

***PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
(APBD) TERHADAP DISPARITAS REGIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2018***

Oleh
Evita Retno Ningrum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan
Ekonomi Pembangunan Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya
evitaretnoningrum07@gmail.com

ABSTRAK

***PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PDRB DAN PENGELUARAN PEMERINTAH
(APBD) TERHADAP DISPARITAS REGIONAL DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2010-2018***

Disparitas regional atau ketimpangan wilayah merupakan permasalahan yang selalu timbul dalam pembangunan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan Sumber Daya Alam ataupun Sumber Daya Manusia serta infrastruktur tiap daerah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, adakah pengaruh antara Jumlah Penduduk terhadap Disparitas Regional? Adakah Pengaruh antara PDRB terhadap Disparitas Regional? Adakah Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (APBD) terhadap Disparitas Regional? dan Adakah pengaruh antara Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran pemerintah terhadap (APBD) Disparitas Regional?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu sesuai dengan perumusan masalah yang ditetapkan. Populasi penelitian yang digunakan yaitu seluruh data Time Series Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah, dan Disparitas Regional selama tahun 2010-2018, dengan Jumlah Sampel yang diambil dari data time series pada tahun 2010-2018, yaitu sebanyak 9 sampel. Data yang digunakan merupakan data sekunder dengan pendekatan kuantitatif deskriptif.

Teknik Analisis Regresi Berganda menggunakan Uji Hipotesis Parsial (Uji T) dan Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) dengan nilai sig ($< 0,05$), H_0 ditolak. Hasil analisis penelitian menyimpulkan bahwa Variabel bebas yang meliputi Jumlah Penduduk, dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Disparitas Regional, sedangkan Pengeluaran pemerintah (APBD) tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Disparitas Regional. Variable Dominan yang diketahui pada ketiga Variabel tersebut yaitu Variabel PDRB (X_2).

Kata kunci :Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah, Disparitas Regional

PENDAHULUAN

Pembangunan tidak hanya menaikkan PDB ataupun PDRB per tahun saja. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara untuk mengembangkan dan membangun kegiatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya.

Peningkatan PDRB berdampak pada perubahan sektoral dan strukturan yang mendominasi pada perubahan sektor pertanian menjadi sektor industri ataupun jasa, tetapi perubahan setiap sektornya dapat mengalami perubahan yang berbeda-beda.. Pada wilayah Jawa Timur sendiri merupakan Provinsi yang dianggap sangat berpotensi karena struktur ekonominya yang cukup besar,

(Arsyad, 2010) menyebutkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi suatu Negara, yaitu yang pertama ialah Pertumbuhan Penduduk disertai dengan lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan output dalam perekonomian. Kedua adalah adanya Akumulasi Modal, yang artinya pemilik modal memiliki kesempatan untuk melakukan investasi, sehingga dapat meningkatkan output perekonomian daerah tersebut. Ketiga, Kemajuan Teknologi, dan yang terakhir yaitu pengelolaan Sumber Daya Institusi.

Terbentuknya (APBD) dapat diketahui bagaimana arah kebijakan fiscal pemerintah, serta memperikarakan anggaran yang digunakan untuk menetapkan target yang hendak diinginkan dalam penerimaan pendapatan ataupun pengeluaran.. Provinsi Jawa Timur memiliki nilai pendapatan yang didapat pada tahun 2015 sebesar Rp76.164.219.567.197 sedangkan pada tahun 2016 realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 79 609 435 502 872. Sedangkan realisasi belanja yang digunakan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010 sebesar Rp 2.034.370.715.366 dan untuk tahun 2016 belanja negara yang ter-realisasi sebesar Rp82.908.944.223.163.

Ketimpangan wilayah menjadi permasalahan yang timbul dalam pembangunan. Ketimpangan yang sering dipermasalahkan yaitu ketimpangan ekonomi. Ketimpangan pembangunan ekonomi terjadi dalam proses pembangunan ekonomi dengan adanya perbedaan sumber daya alam serta infrastruktur yang dimiliki oleh tiap daerah. Jawa Timur ialah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau Jawa, hal ini tidak terlepas dari adanya permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi. Provinsi Jawa

Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan distribusi pendapatan. Pembangunan ekonomi yang terjadi di Jawa Timur dapat dimaksimalkan dengan menekan angka ketimpangan pembangunan mengarah pada pemerataan pembangunan ekonomi dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi yang mempunyai daya unggul di setiap daerahnya untuk dikembangkan.

Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu menentukan adanya disparitas regional yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur, serta pengaruh yang antara jumlah penduduk, PDRB dan Pengeluaran Pemerintah (APBD).

Dengan rumusan masalah yaitu seberapa jumlah penduduk berpengaruh terhadap disparitas regional di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018, seberapa PDRB berpengaruh terhadap disparitas regional di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018, dan seberapa pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap disparitas regional di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018. Yang bertujuan hendak membuktikan dan menganalisis perumusan masalah yang ada.

LANDASAN TEORI

Jumlah Penduduk

Penduduk ialah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. (Subagiarta, 2006:10).

Dengan adanya permasalahan penduduk maka pemerintah memiliki cara untuk menekan jumlah dari pertumbuhan penduduk dengan berbagai cara misalnya dengan dilaksanakannya program keluarga berencana dengan penundaan umur perkawinan (Daryanto, 1996:1).

PDRB

PDRB dikatakan sebagai nilai tambah atau pendapatan yang didapat dari sektor yang ada di suatu wilayah berupa barang ataupun jasa. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku nilai barang ataupun jasa dihitung menggunakan harga tiap tahunnya, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dapat dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu saja.

Pengeluaran Pemerintah (APBD)

Menurut buku pengelolaan keuangan daerah (2012:141) karya Abdul Halim dan Muhammad Iqbal Pengeluaran Pemerintah pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan

penyerahan suatu wilayah. Yang dimaksudkan yaitu, penggunaan pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersifat untuk memenuhi kebutuhan serta Hak masyarakat di wilayah tersebut.

Disparitas Regional

Pada pembangunan ekonomi regional, Williamson (1965) menyatakan bahwa pembangunan, disparitas regional menjadi lebih besar apabila pembangunan hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu atau daerah maju saja. Pada tahap yang lebih maju, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tampak bahwa keseimbangan antar daerah yang maju ataupun yang terbelakang dengan signifikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data runtut waktu (Time Series) dari BPS, Bappeda, DJPK serta Website resmi pemerintah yang kemudian diolah dan dianalisis. Data yang digunakan yaitu sumber data PDRB, Jumlah Penduduk, pendapatan dan belanja daerah, serta pengeluaran Pemerintah.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan

data yang di dapat dari website resmi Badan Pusat Statistika Jawa Timur dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data time series Jumlah Penduduk, PDRB, Pengeluaran Pemerintah dan Disparitas Regional selama periode 2010-2018 di Jawa Timur. Sedangkan sampel yang digunakan sejumlah 9 sampel dari data time series tahun 2010-2018. Hal ini dikarenakan Populasi dan Sampel yang saya gunakan menyesuaikan dengan judul penelitian yang saya teliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Jumlah Penduduk

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
2010	37.565.706
2011	37.840.657
2012	38.106.590
2013	38.363.195
2014	38.610.202
2015	38.847.888
2016	39.075.152
2017	39.292.971
2018	39.500.851

Sumber :BPS Proyeksi Penduduk

Provinsi Jawa Timur 2010-2018

PDRB

PDRB dianggap indikator yang sangat penting untuk mengetahui adanya ketimpangan regional, dikarenakan adanya perbedaan struktur geografis dan perekonomiannya. Berikut data PDRB yang ada di Provinsi Jawa Timur:

Tabel 4.4
PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) di
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2018 (Miliar Rupiah)

TAHUN	PDRB
2010	990.648,0
2011	1.121.814,2
2012	1.251.752,2
2013	1.391.890,3
2014	1.547.074,0
2015	1.696.827,3
2016	1.866.884,8
2017	2.037.083,8
2018	2.223.661,7

Sumber : BPS PDRB ADHB Provinsi Jawa Timur 2010-2018

Pengeluaran Pemerintah (APBD)

Rincian dari APBD ialah penerimaan, biaya-biaya lainnya serta pengeluaran. Berikut adalah table data Pengeluaran Pemerintah (APBD) yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat di Jawa Timur agar tidak timbul adanya ketimpangan:

Tabel 4.5
Pengeluaran Pemerintah (APBD) di
Provinsi Jawa Timur
Tahun 2010-2018

TAHUN	PENGELUARAN PEMERINTAH (APBD)
2010	414.654.504.387
2011	468.465.574.264
2011	856.609.109.884
2013	903.981.243.758
2014	607.852.406.395
2015	1.050.216.286.789
2016	1.291.326.165.894
2017	897.589.078.360
2018	570.816.859.194

Sumber data: djpk.kemenkeu.go.id

Table 4.5 merupakan data Pengeluaran Pemerintah (APBD) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2018. Pada data diatas didapat bahwa anggaran yang diberikan pada tahun 2010 sebesar 414.654.504.387 dan semakin naik hingga pada tahun 2013 sebesar 903.981.243.758. Namun, penganggaran pengeluaran yang diberikan Pemerintah pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 607.852.406.395. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan dari tahun 2014-2016, dengan dana sebesar 1.291.326.165.894, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar

897.589.078.360 dan turun kembali pada tahun 2018 sejumlah 570.816.859.194.

Disparitas Regionala

. Alat yang dapat digunakan untuk menguji tingkat disparitas suatu wilayah yaitu dengan Indeks Williamson.

Tabel 4.6
Disparitas Regional (menurut hitungan Indeks Williamson) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2018

TAHUN	Disparitas Regional
2010	0,942
2011	0,942
2012	0,950
2013	0,951
2014	0,952
2010	0,965
2016	0,968
2017	0,973
2018	0,983

Sumber data: Data Olahan 2020

Table 4.6 merupakan data terjadinya disparitas regional di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2018. Menurut data diatas dapat disimpulkan bahwa Provinsi di Jawa Timur mengalami ketimpangan yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan data oalahan terakhir pada tahun 2018 mendapatkan angka disparitas tinggi yaitu sebesar 0,983. Dapat dilihat bahwa disparitas

regional di Jawa Timur semakin meningkat tiap tahunnya, hanya pada tahun 2010-2011 angka disparitasnya sama dengan 0,942. Disimpulkan bahwa keadaan ketimpangan yang ada di Provinsi Jawa Timur dikatakan sangat tidak bagus.

HASIL ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

Hasil regresi atas adanya variable Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah (APBD) terhadap Disparitas Regional di Jawa Timur. Dari pengolahan menggunakan SPSS 16 didapat persamaan berikut:

Tabel 4.12

Hasil Analisa Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1)	.905	.003		309.729	.000
JP	1.769E-7	.000	.189	3.221	.023
PDRB	3.234E-5	.000	.946	16.823	.000
APBD	-3.822E-12	.000	-.077	-1.271	.260

a. Dependent Variable: DISPARITAS

Setelah dilakukan pengujian regresi linear berganda terhadap data penelitian diperoleh hasil pada table 4.12 dengan signifikan $\alpha = 5\%$. Maka dapat dituliskan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 P X_2 + \beta_3 X_3$$

$$Y = 0,905 + 1.769E-7X_1 + 3.234E-5X_2 - 3.822E-12X_3$$

Analisis Determinasi Koefisien (R^2)

Hasil uji determinasi koefisien determinasi pada table 4.12 diperoleh angka sebesar 0,994, yang berarti variable bebas (Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah (APBD), terhadap variable terikat (Disparitas Regional) adalah sebesar 99,4%. Maka sisanya yang sebesar 0,6% dipengaruhi oleh variable lain, yang artinya Disparitas Regional (Y) tidak hanya dipengaruhi oleh Jumlah Penduduk (X_1), PDRB (X_2), dan Pengeluaran Pemerintah (APBD) (X_3), tetapi juga dipengaruhi variable lain (e).

UJI HIPOTESIS

Hasil Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(t)	.905	.003		309.729	.000
JP	1.769E-7	.000	.189	3.221	.023
PDRB	3.234E-5	.000	.946	16.823	.000
APBD	-3.822E-12	.000	-.077	-1.271	.260

a. Dependent Variable:

DISPARITAS

Hasil perhitungan dengan Program SPSS 16.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) *Jumlah Penduduk berpengaruh secara parsial terhadap Disparitas Regional.*

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai t_{hitung} Jumlah Penduduk sebesar 3.221 dengan signifikan 0,023. Hal ini berarti sebesar $0,023 < 0,05$, dan t_{hitung} Jumlah Penduduk sebesar $3.221 > t_{tabel}$ 2,306. Maka diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas regional.

- b) *PDRB berpengaruh secara parsial terhadap Disparitas Regional*

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai t_{hitung} PDRB sebesar 16.823 dengan signifikan 0,00. Hal ini berarti sebesar $0,00 < 0,05$, dan t_{hitung} PDRB $16.823 > t_{tabel}$ 2,306. Maka diputuskan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas regional.

- c) *Pengeluaran Pemerintah (APBD) berpengaruh secara parsial terhadap Disparitas Regional*

Berdasarkan Tabel 4.12 nilai t_{hitung} Pengeluaran Pemerintah (APBD) sebesar -1.271 dengan signifikan 0,260. Hal ini berarti sebesar $0,260 > 0,05$, dan t_{hitung} PDRB sebesar $-1.271 < t_{tabel}$ 2,306. Maka diputuskan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima. Maka Pengeluaran Pemerintah (APBD) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap disparitas regional.

Hasil Uji F

Tabel 4.14

Uji F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.002	3	.001	130.870	.000 ^a
Residual	.000	5	.000		
Total	.002	8			

a. Predictors: (Constant),

APBD, PDRB, JP

b. Dependent Variable:

DISPARITAS

Table 4.13 merupakan hasil dari uji simultan atau Uji F dengan diperoleh nilai signifikan untuk Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah (APBD) secara bersama-sama atau simultan terhadap Disparitas regional di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2018, adalah sebesar 0,001, dengan nilai F_{hitung} 130.870 dan nilai F_{tabel} nya dengan $df_1(k-1 = 4-1 = 3)$, df_2 ($n - k = 9-4 = 5$), maka diperoleh F_{tabel} sebesar 5,41

Dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} 130.870 $> F_{tabel}$ 5,41 dengan signifikannya $0,000 < 0,05$. Maka Hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variable Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah (APBD) secara simultan atau bersama terhadap Disparitas Regional di Provinsi Jawa Timur diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan adanya pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah (APBD) terhadap Disparitas Regional di Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2010-2018. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan yang ada dalam penelitian ini maka dapat diambil beberapa kesimpulan, anatar lain:

1. Jumlah penduduk memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap disparitas regional di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil tersebut didapat bahwa faktor tingginya jumlah penduduk yang ada di Provinsi Jawa memiliki pengaruh terhadap disparitas regional.
2. PDRB memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap disparitas regional di Provinsi Jawa Timur. Dapat disimpulkan bahwasannya apabila PDRB meningkat maka disparitas regional atau terjadinya ketimpangan di Jawa Timur juga mengalami peningkatan.
3. Pada hasil penelitian tentang hubungan pengaruh Pengeluaran Pemerintah (APBD) terhadap disparitas regional didapat bahwa Pengeluaran Pemerintah (APBD)

berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap disparitas regional. Dapat dijelaskan bahwa suatu wilayah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tinggi, maka wilayah tersebut dikatakan dapat mensejahterakan masyarakatnya, oleh sebab itu mengakibatkan turunnya angka ketimpangan.

4. Kesimpulan yang terakhir yang didapat dalam penelitian ini, dengan uji simultan didapat bahwa ketiga variable (Jumlah Penduduk, PDRB, dan Pengeluaran Pemerintah (APBD)) memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap disparitas regional dan diterima penelitiannya

SARAN

Dari kesimpulan diatas maka Saran yang dapat diberikan oleh peneliti, antara lain:

1. Diharapkan pemerintah dapat mengurangi angka pertumbuhan penduduk, hal ini sangat tinggi dalam mempengaruhi angka ketimpangan di Jawa Timur. Sebaiknya pemerintah lebih menggalakkan program Keluarga Berencana serta Undang-Undang umur perkawinan. Selain itu pemabersihan pelatihan terhadap

sumber daya manusia juga menjadi salah satu cara dapat menjamin penduduk yang berkeaktifitas tinggi dan dapat membantu perekonomian wilayahnya.

2. Diharapkan pemerintah lebih meningkat Produk Domestic Regional Bruto di Jawa Timur dengan mengekspor hasil sektoral yang ada di Wilayah Jawa Timur apabila sudah memenuhi kebutuhan masyarakatnya terlebih dahulu.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan para investor untuk berinvestasi pada wilayah Jawa Timur agar meningkatnya PDRB dan dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah
4. Kaitannya dengan keuangan yang diberikan pada setiap daerah, sebaiknya dalam penggunaan dana Pengeluaran Pemerintah (APBD) pemerintah lebih mengutamakan kebutuhan masyarakat, dan mengurangi belanja kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk kebutuhan pembangunan gedung Pemerintah daerah saja. Hal ini diharapkan agar masyarakat lebih sejahtera, hidup layak serta mendapatkan haknya dengan baik, sehingga dapat menurunkan

angka ketimpangan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

5. Diharapkan pemerintah lebih cepat dalam mengurangi angka ketimpangan regional yang ada di Jawa Timur. Hal ini dikarenakan angka yang dicapai sudah sangat tinggi. Saran yang diberikan peneliti yaitu dengan memanfaatkan serta melatih sumber daya manusia-nya, apabila SDM-nya sudah baik, maka pertumbuhan PDRB diwilayah dapat ditingkatkan, dan yang terakhir yaitu dapat menganggarkan dana yang membantu masyarakat untuk lebih mempermudah akses dari kegiatan ekonominya, salah satunya akses jalan yang diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Iqbal, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah: seri Bungan Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi 3*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Ardani, Amirudin, 1990. *Analysis of Region Growth and Disparity: The Impact Analysis of the Inpres Project on Indonesia Development.Ph.D Thesis University of Pensylvania USA*, tidak dipublikasikan
- Arsyad Lincold. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Arsyad, Lincoln, 1999, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE
- Daryanto, 1996. *Kependudukan*. Penerbit tarsito Bandung.
- Gama, Ayu Savitri, 2007. *Disparitas dan Konvergensi Peroduk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*, Jurnal Ekonomi dan Sosial Vol. 2 No.1
- Gudono, 2011. *Analisa Data Multivariat* Edisi pertama. Yogyakarta : BPFE – Yogyakarta.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Terjemahan Penerbit Rajawali*, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat (2007). *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Kuznets, Simon 1995, dalam Purnamasari, 2009. “*Economic Growth and Income Inequality*”. American Economic Review
- Mydral, Gunnar, 1957. *Economic GTheory and Underdeveloped Regions. London: Duckworth*
- Nurhuda, Muluk dan Prasetyo. 2011. *Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1
- Prawira, Yudha. 2011. *Transformasi Struktur Ekonomi Kabupaten Siak Tahun 2001-2010*. Riau: Universitas Riau.
- Sadono, Sukirno. 2010. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga PT. Raja Grasindo Perseda. Jakarta.
- Sjafrizal, 1997, *pertumbuhan ekonomi dan Ketimpangan Regional*